

THE INDONESIAN FISCAL DECENTRALIZATION POLICY IN REFORMATION PERIOD: AN OVERVIEW

Kadek Cahya Susila Wibawa

Abstrak

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai menjadi isu ekonomi dan isu politik yang utama sejak tahun 1998, pada saat jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Sebagai respon dari keadaan tersebut, Presiden BJ Habibie sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan ad interim saat itu, telah menetapkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kedua undang undang ini mulai diimplementasikan semenjak Presiden Abdur Rahman Wahid berkuasa dan pada saat Presiden Megawati berkuasa, undang undang tersebut diubah kembali untuk disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kritikan terhadap kedua undang undang tersebut adalah bahwa implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal telah keluar dari konsep besar sebagaimana yang telah dicita-citakan. Pertama-tama, di bawah undang undang yang baru tersebut, kekuasaan pemerintah pusat semakin dikebiri sehingga kekuasaan pemerintah pusat seolah-olah menjadi kekuasaan yang kedua setelah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi serius, karena pemerintah daerah menjadi ancaman dan terkesan meremehkan pemerintah pusat. Hasilnya yang sangat ditakuti adalah bahwa implementasi dari kedua undang-undang ini menjadi ancaman bagi integrasi Negara Kesatuan Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan desentralisasi fiskal, reformasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah